



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA**



Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi	2
C. Sistematika Pelaporan	6
BAB II Rencana Aksi	7
A. Identifikasi Permasalahan	7
B. Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	9
BAB III Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019	20
A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	20
B. Evaluasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur	37
C. Saran Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Laporan Kinerja dalam mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	38
D. Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Upaya Pemecahannya	39
E. Rencana Perbaikan Untuk Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur	41
BAB IV Penutup	44
A. Simpulan	44
B. Rekomendasi	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pekerjaan umum serta tugas pembantuan berdasar Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dituntut untuk berperan serta dalam upaya Pemerintah melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur melalui Reformasi Birokrasi terus berbenah untuk mendukung terwujudnya "meningkatnya jalan provinsi yang dapat dilalui dengan cepat, aman dan nyaman" yang merupakan tujuan Dinas sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2014-2019.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 dan Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur Nomor. 069.5/21802/31.2/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal

Percepatan Pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi.

Upaya Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui Rencana Aksi pada 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari 9 (sembilan) program yakni manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM Aparatur, penguatan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan *Quick Wins*.

Rencana aksi Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dievaluasi dan dilaporkan perkembangannya setiap tahun agar tersedia data yang informatif terkait capaian program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi. Sehingga dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat dijadikan bahan dukung untuk efektifitas dan efisiensi evaluasi berikutnya guna menghasilkan penilaian dan rekomendasi perbaikan bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yang berkesinambungan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi.

B. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur mengemban tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur adalah penyelenggaraan jalan provinsi di Jawa Timur meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan yang tersebar di 30 kabupaten/ kota di Jawa Timur dengan panjang 1.421,00 km sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/128/KPTS/013/2016 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas, kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

b. Sekretariat.

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

c. Bidang Pengaturan dan Pengendalian

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman operasional, pengembangan jaringan jalan, dan evaluasi penyelenggaraan jalan serta penetapan status dan fungsi jalan.

d. Bidang Bina Teknik.

mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknik, pengawasan teknik, kajian teknik, dan pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan.

e. Bidang Pembangunan dan Peningkatan

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan serta pemberian fasilitasi pengadaan lahan.

f. Bidang Pemeliharaan.

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan, penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana/kejadian alam.

g. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan (UPT PJJ)

merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penanganan, pengelolaan jalan dan jembatan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Bina Marga terdiri dari :

1. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Surabaya,
2. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto,
3. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro,
4. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun,

5. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan,
6. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri,
7. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang,
8. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Probolinggo,
9. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember,
10. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Banyuwangi,
11. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan,
12. UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Daya Manusia

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur didukung kekuatan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 914 orang (Akhir 2019), dengan rincian berdasarkan golongan ruang dan gender sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Rekap Jumlah PNS Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berdasarkan Golongan Ruang dan Gender

No	Pendidikan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	105	83	22
2	S-1	261	195	66
3	DIII	10	5	5
4	SLTA	455	389	66
5	SLTP	41	41	0
6	SD	42	42	0
TOTAL		914	755	159

C. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kata Pengantar;
2. Daftar Isi;
3. Bab I Pendahuluan;

Bab ini menguraikan secara ringkas latar belakang penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2019 (Laporan RB Tahun 2019); Gambaran Umum Organisasi; Sistematika Laporan RB Tahun 2018.

4. Bab II Rencana Aksi;

Dalam bab ini menguraikan Identifikasi Permasalahan; Rencana Aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019.

5. Bab III Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 yang menggambarkan pencapaian atas komponen pengungkit dan komponen hasil. Bab ini juga menguraikan mengenai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi, serta rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

6. Bab IV Penutup;

Dalam Bab Penutup ini berisi simpulan dan rekomendasi, yang menguraikan secara singkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2019, serta rekomendasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

BAB II

RENCANA AKSI

A. Identifikasi Permasalahan

Sasaran reformasi birokrasi sesuai Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 adalah:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut di atas, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Mental Aparatur

Perilaku aparatur yang sudah menjadi mental model birokrasi dipandang masyarakat adalah lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

2. Pengawasan

Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku perilaku negatif birokrat, salah satunya perilaku koruktif. Perubahan perilaku koruptif aparatur harus diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumberdaya yang digunakan sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang

bermanfaat) bagi masyarakat. Perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya.

4. Kelembagaan

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

5. Tatalaksana

Ketidajelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan sehingga proses yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Perubahan pada sistem tatalaksana diharapkan dapat mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

6. SDM Aparatur

Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Perubahan dalam pengelolaan SDM dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

7. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda membuka kemungkinan penyimpangan yang dapat merugikan negara. Perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

8. Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

B. Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) untuk mewujudkan hasil yang diharapkan, Rencana Aksi RB Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dilakukan pada 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari 9 (sembilan) program yakni manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM Aparatur, penguatan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan *Quick Wins*.

Rencana aksi RB Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur ini disusun selaras dengan program-program RB pada Road Map level makro (Nasional) dan Petunjuk Teknis Gubernur Jawa Timur

tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019. Berikut rencana aksi pelaksanaan RB Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur tahun 2019 :

1. Manajemen Perubahan

Program manajemen perubahan merupakan area perubahan yang sangat penting dan mendasar dalam pelaksanaan RB guna melakukan perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) individu atau unit kerja menjadi lebih baik sesuai tujuan dan sasaran RB. Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Pada area ini, rencana aksi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Aksi Manajemen Perubahan

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019
1.	Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;	Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;	Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan di lingkungan DPU Bina Marga tentang Implementasi Reformasi Birokrasi
			Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi TA 2019
2.	Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir	Pembentukan dan Internalisasi Agent of Change	Pembentukan Agent of Change (Agen Perubahan) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
		Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

2. Penguatan Sistem Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Pada area ini, rencana aksi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Aksi Penguatan Sistem Pengawasan

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019
1.	Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM di masing-masing kementerian/lembaga dan pemda;	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada salah satu unit kerja DPU Bina Marga Prov. Jatim
2.	Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di masing-masing kementerian/lembaga dan pemda;	Pengendalian Gratifikasi	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
3.	Pelaksanaan whistleblowing system di masing-masing kementerian/lembaga dan pemda	Pembangunan/Pengembangan whistleblowing system	Sosialisasi whistleblowing System pada acara Rapat Koordinasi di lingkungan DPU Bina Marga Prov. Jatim
4.	Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di masing-masing kementerian/lembaga dan pemda;	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan Benturan Kepentingan
5.	Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja di masing-masing kementerian/lembaga dan pemda;	Pelaksanaan/penerapan SPIP	Monev Pelaksanaan Penyusunan Renstra dan Monev Pelaksanaan SAKIP TA 2019 di lingkungan DPU Bina Marga Prov. Jatim
			Monev Penatausahaan Keuangan TA 2019 di lingkungan DPU Bina Marga Prov. Jatim
6.	Penanganan pengaduan	Penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019
	masyarakat di masing-masing kementerian/lembaga dan pemda		informasi yang diterima melalui Media Sosial Facebook, Twitter dan Quick Respond Road Management System (QRRMS).

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja agar birokrasi berkinerja tinggi dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya. Pada area ini, rencana aksi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rencana Aksi Penguatan Akuntabilitas Kinerja

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019
1.	Pembangunan/ pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja	Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja	Pemanfaatan Aplikasi e-Master dalam manajemen kinerja pegawai untuk penyusunan, pelaporan, pengukuran dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
			Updating data kinerja pada aplikasi e-sakip, e-LPPD dan e-LKPJ
			Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019
			Pengukuran Kinerja Unit Kerja berbasis elektronik
			Pemutakhiran data kinerja secara berkala
		Penyusunan pohon kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas/pejabat pelaksanan	Penyusunan pohon kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas/pejabat pelaksana
		Penyusunan Perjanjian Kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas/pejabat pelaksanan	Penyusunan Perjanjian Kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas/pejabat pelaksana

4. Penguatan Kelembagaan

Program penguatan kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelembagaan secara profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Pada area ini, rencana aksi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rencana Aksi Penguatan Kelembagaan

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019
1.	Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan ASN di masing-masing K/L dan Pemda	Evaluasi OPD berdasarkan proses bisnis	Evaluasi Kesesuaian Proses Bisnis dengan Renstra 2015-2019 dan DPA 2019
		Penataan OPD berdasarkan proses bisnis	Rencana Evaluasi Penataan Organisasi DPU Bina Marga berdasarkan proses bisnis

5. Penguatan Tatalaksana

Program penguatan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen organisasi di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Pada area ini, rencana aksi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Rencana Aksi Penguatan Tatalaksana

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019
1.	Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masing-masing K/L dan Pemda;	-	Penerapan e-planning dan e-budgeting dalam perencanaan dan penganggaran DPU Bina Marga Prov. Jatim
2.	Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di	Penyusunan Peta Proses Bisnis	Penyusunan Proses Bisnis DPU Bina Marga

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019
	masing-masing K/L dan Pemda;		
		Penyusunan SOP	Penyusunan SOP
		Implementasi dan Evaluasi SOP	Implementasi SOP
			Peningkatan tata kelola/ institusi dalam penanganan jalan provinsi Jawa Timur melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
3.	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di masing-masing K/L dan Pemda;	-	Penyampaian informasi kegiatan DPU Bina Marga pada masyarakat secara up to date melalui web site binamarga.jatimprov. go.id
4.	Penerapan sistem kearsipan yang handal di masing-masing K/L dan Pemda;	-	Pembuatan rak arsip untuk masing-masing Bidang dan Sekretariat

6. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Pada area ini, rencana aksi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7 Rencana Aksi Penguatan Sistem Manajemen
Sumber Daya Manusia Aparatur

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019
1.	Perbaiki berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan masing-masing K/L dan Pemda.	Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan
		Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi
2.	Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di lingkungan masing-masing K/L dan Pemda;	-	Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi yang bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim
3.	Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan masing-masing K/L dan Pemda;	-	Penetapan Sistem Promosi berdasarkan Daftar Urutan Pegawai (DUK)
4.	Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center;	-	Pengajuan usulan Assestment pegawai/uji kompetensi eselon III pada Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim
5.	Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai di masing-masing K/L dan Pemda;	-	Penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi
6.	Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja di masing-	Perumusan dan penerapan system rewards and punishment dalam pengukuran kinerja	Penerapan system rewards and punishment dalam pengukuran kinerja

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019
	masing K/L dan Pemda;		
7.	Pembangunan /pengembangan sistem informasi ASN di masing-masing K/L dan Pemda;	-	Penerapan Sistem Informasi ASN DPU Bina Marga
8.	Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di masing-masing K/L dan Pemda;	-	Pelaksanaan Bimbingan Teknis pada ASN dan CPNS Milenial di lingkungan ASN DPU Bina Marga Prov. Jatim
9.	Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di masing-masing K/L dan Pemda;	-	Penerapan penyusunan data base profil ASN di lingkungan ASN DPU Bina Marga Prov. Jatim
10.	Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di masing-masing K/L dan Pemda.	-	-
11.	Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);	-	Penerapan Sistem Promosi berdasarkan Daftar Urutan Pegawai (DUK)
12.	Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN	-	Penyusunan Pola Karier pegawai dengan system Daftar Urutan Pegawai (DUK)
13.	Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan	-	-

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019
14.	Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja	-	Pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia ASN

7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan instansi pemerintah. Pada area ini, rencana aksi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.8 Rencana Aksi Penguatan Peraturan Perundang-undangan

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019
1.	Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;	Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan (PERDA, Pergub, SK) yang sedang diberlakukan	Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan (Pergub dan SK Gub.) yang sedang diberlakukan
2.	Menyempurnakan /mengubah berbagai peraturan perundangundangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;	Menyempurnakan /mengubah berbagai peraturan perundangundangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain	Menyempurnakan /mengubah berbagai peraturan yang dipandang tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019
3.	Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan;	-	-

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Pada area ini, rencana aksi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.9 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019
1.	Penerapan pelayanan satu atap di masing-masing kementerian/ lembaga dan pemda;	-	Pelayanan perijinan pemanfaatan tanah pada rumija yang terintegrasi dengan P2T Prov. Jatim
2.	Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari di masing-masing kementerian/ lembaga dan pemda;	-	Penerapan percepatan pelayanan perijinan berupa Rekomtek pemanfaatan tanah pada rumija selama maksimal 12 hari

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019
3.	Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan di masing-masing kementerian/lembaga dan pemda;	-	Penyusunan SOP Penerbitan Rekomtek pemanfaatan tanah pada rumija untuk utilitas/ non utilitas
4.	Pembangunan/ pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di masing-masing kementerian/lembaga dan pemda;	Pembangunan/ pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Pembangunan/ pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik

9. Quick Wins

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program terkait 9 (sembilan) area perubahan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan *Quick Wins* sebagai suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai guna mengawali program yang besar dan sulit, yaitu dengan menerapkan motto Penanganan kerusakan jalan provinsi dalam waktu 1x24 jam sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*.

BAB III
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2019

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Pelaksanaan Rencana Aksi pada 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari 9 (sembilan) program di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur tahun 2019 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang dapat menghasilkan pencapaian untuk mewujudkan sasaran RB. Secara singkat pelaksanaan RB dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. 1 Komponen Pengungkit

1. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja pada tahun 2019 upaya-upaya yang telah dilakukan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Rencana Aksi Manajemen Perubahan

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019	REALISASI RENCANA AKSI RB TA 2019
1.	Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;	Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;	Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan di lingkungan DPU Bina Marga tentang Implementasi Reformasi Birokrasi	Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan di lingkungan DPU Bina Marga tentang Implementasi Reformasi Birokrasi oleh narasumber dari Biro Organisasi Setda Prov. Jawa Timur pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran DPU Bina Marga TA 2019 Oktober 2019.

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019	REALISASI RENCANA AKSI RB TA 2019
			Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi TA 2019	Rencana Kerja Reformasi Birokrasi TA 2019
2.	Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir	Pembentukan dan Internalisasi Agent of Change	Pembentukan Agent of Change (Agen Perubahan) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	SK Kepala DPU Bina Marga tanggal 01 Nopember 2019 No. 821.1/20540/KPTS/103/2019 tentang Agent of Change DPU Bina Marga Prov. Jatim
		Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	SK Kepala DPU Bina Marga tanggal 01 Nopember 2019 No. 821.1/20539/KPTS/103/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi dpu Bina Marga Prov. Jatim

2. Penguatan Pengawasan

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, penguatan sistem pengawasan memastikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku, untuk itu upaya-upaya yang telah dilakukan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Rencana Aksi Penguatan Pengawasan

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019	REALISASI RENCANA AKSI RB TA 2019
1.	Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM di masing-masing kementerian/lembaga dan pemda;	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada salah satu unit kerja DPU Bina Marga Prov. Jatim	Surat Kepala DPU Bina Marga tentang Usulan Zona Integritas DPU Bina Marga kepada Inspektur Prov. Jatim
2.	Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di masing-masing kementerian/lembaga dan pemda;	Pengendalian Gratifikasi	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Eselon II dan Eselon III
3.	Pelaksanaan whistleblowing system di masing-masing kementerian/lembaga dan pemda	Pembangunan/Pengembangan whistleblowing system	Sosialisasi whistleblowing System pada acara Rapat Koordinasi di lingkungan DPU Bina Marga Prov. Jatim	Sosialisasi whistleblowing System pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran DPU Bina Marga TA 2019 Oktober 2019.
4.	Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di masing-masing kementerian/lembaga dan pemda;	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan Benturan Kepentingan	Melakukan mediasi
5.	Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja di masing-masing kementerian/lembaga dan pemda;	Pelaksanaan/penerapan SPIP	Monev Pelaksanaan Penyusunan Renstra dan Monev Pelaksanaan SAKIP TA 2019 di lingkungan DPU Bina Marga Prov. Jatim	SK Kepala Kepala DPU Bina Marga tentang: - Tim penyusunan Renstra - Tim SAKIP
			Monev Penatausahaan Keuangan TA 2019 di lingkungan DPU Bina Marga Prov. Jatim	SK Kepala Kepala DPU Bina Marga tentang: - Tim Fungsi Verifikasi dan Pembantu Fungsi Verifikasi - Tim Fungsi Akuntansi dan Pembantu Fungsi Akuntansi - Tim Fungsi Pembelanjaan

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019	REALISASI RENCANA AKSI RB TA 2019
				dan Pembantu Fungsi Pembelanjaan
6.	Penanganan pengaduan masyarakat di masing-masing kementerian/lembaga dan pemda	Penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan informasi yang diterima melalui Media Sosial Facebook, Twitter dan Quick Respond Road Management System (QRRMS).	Pembentukan sosial media untuk pengaduan masyarakat. Facebook: Dinas Bina Marga Jatim Twitter: @dbmjatim
				Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat oleh Tim Unit Pengelola Pengaduan (UPP) DPU Bina Marga
				Pembuatan aplikasi Quick Respond Road Management System untuk penanganan pengaduan masyarakat.

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur upaya-upaya yang telah dilakukan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Rencana Aksi Penguatan Akuntabilitas Kinerja

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019	REALISASI RENCANA AKSI RB TA 2019
1.	Pembangunan/ pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja	Pembangunan/ pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja	Pemanfaatan Aplikasi e- Master dalam manajemen kinerja pegawai untuk penyusunan, pelaporan, pengukuran dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).	Pemanfaatan Aplikasi e- Master dalam manajemen kinerja pegawai untuk penyusunan, pelaporan, pengukuran dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
			Updating data kinerja pada aplikasi e-sakip, e-LPPD dan e-LKPJ secara berkala	Data kinerja DPU Bina Marga pada aplikasi e-sakip, e-LPPD dan e-LKPJ yang up to date
			Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja TA 2019 melalui sosialisasi tentang materi akuntabilitas kinerja PNS oleh BKD Prov. Jatim pada pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran DPU Bina Marga TA 2019 Januari 2019.
				Keikutsertaan SDM SAKIP pada Diklat Implementasi SAKIP Pemerintah Prov. Jatim di BPSDM TA 2019
			Pengukuran Kinerja Unit Kerja berbasis elektronik	Pengukuran kinerja unit kerja berbasis elektronik yg up to date: - Aplikasi SMEP (bulanan) - Form TEPR (bulanan) - Aplikasi Sievap untuk unit kerja SKPD TP (triwulan-an)
			Pemutakhiran data kinerja secara berkala	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran DPU Bina Marga TA 2019 Januari 2019 dan Oktober 2019.

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019	REALISASI RENCANA AKSI RB TA 2019
				Monitoring dan evaluasi data kinerja ke UPT PJJ DPU Bina Marga TA 2019.
		Penyusunan pohon kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas/pejabat pelaksanan	Penyusunan pohon kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas/pejabat pelaksana	Pohon kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas/pejabat pelaksana
		Penyusunan Perjanjian Kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas/pejabat pelaksanan	Penyusunan Perjanjian Kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas/pejabat pelaksana	Perjanjian Kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas/pejabat pelaksanan TA 2019

4. Penguatan Kelembagaan

Dalam rangka penguatan kelembagaan melalui penurunan tumpang tindih tugas dan fungsi internal dan peningkatan kapasitas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur upaya-upaya yang telah dilakukan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Rencana Aksi Penguatan Kelembagaan

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019	REALISASI RENCANA AKSI RB TA 2019
1.	Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan ASN di masing-masing K/L dan Pemda	Evaluasi OPD berdasarkan proses bisnis	Evaluasi Kesesuaian Proses Bisnis dengan Renstra 2015-2019 dan DPA 2019	Kesesuaian Proses Bisnis dengan Renstra 2015-2019 dan DPA 2019
		Penataan OPD berdasarkan proses bisnis	Penataan OPD berdasarkan proses bisnis	Penataan OPD berdasarkan proses bisnis

5. Penguatan Tatalaksana

Guna mewujudkan hasil yang diharapkan yaitu peningkatan pengembangan *e-government*; peningkatan efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan; dan terciptanya keterbukaan informasi publik, upaya-upaya yang telah dilakukan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Rencana Aksi Penguatan Tatalaksana

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019	REALISASI RENCANA AKSI RB TA 2019
1.	Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di	-	Pemanfaatan aplikasi e-planning dan e-budgeting dalam perencanaan dan penganggaran DPU Bina Marga Prov. Jatim.	Pemanfaatan aplikasi e-planning dan e-budgeting dalam perencanaan dan penganggaran DPU Bina Marga Prov. Jatim untuk penyusunan Renstra 2015-2019 dan DPA 2019.

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019	REALISASI RENCANA AKSI RB TA 2019
	masing-masing K/L dan Pemda;			
2.	Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing K/L dan Pemda;	Penyusunan Peta Proses Bisnis	Penyusunan Peta Proses Bisnis DPU Bina Marga	Peta Proses Bisnis DPU Bina Marga TA 2019
		Penyusunan SOP	Penyusunan SOP	SOP yang ditetapkan dengan SK Kepala DPU Bina Marga
		Implementasi dan Evaluasi SOP	Implementasi SOP	Penerapan SOP pada seluruh unit kerja
			Peningkatan tata kelola/ institusi dalam penanganan jalan provinsi Jawa Timur melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	Bimbingan Teknis Provincial Road Management System (PRMS)
				Pembentukan tim survey PRMS di UPT PJJ dengan SK Kepala DPU Bina Marga
				Rencana Kebutuhan Penanganan Jalan Provinsi berdasarkan program PRMS
3.	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di masing-masing K/L dan Pemda;	-	Penyampaian informasi kegiatan DPU Bina Marga pada masyarakat secara up to date melalui web site binamarga.jatimprov. go.id	Informasi kegiatan DPU Bina Marga pada masyarakat secara up to date melalui web site binamarga.jatimprov. go.id

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019	REALISASI RENCANA AKSI RB TA 2019
				SK Kepala DPU Bina Marga Prov. Jatim no. 600/ 0713/ KPTS/ 103.1/ 2018 Tahun 2018 Tentang Unit Pengelola Pengaduan (UPP)
				SK Kepala DPU Bina Marga Prov. Jatim no. 489/ 0117/ 103/ 2019 Tentang Tim Humas dan Bina Marga News DPU Bina Marga Prov. Jatim
				SK Kepala DPU Bina Marga Prov. Jatim no. 600/ 1191/ KPTS/ 103.1/ 2019 Tentang Pejabat Pengelola/ Penanggung Jawab Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPU Bina Marga Prov. Jatim TA 2019
4.	Penerapan sistem kearsipan yang handal di masing-masing K/L dan Pemda;	-	-	-

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Dalam rangka mewujudkan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, upaya-upaya yang telah dilakukan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6 Realisasi Rencana Aksi Manajemen SDM Aparatur

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019	REALISASI RENCANA AKSI RB TA 2019
1.	Perbaiki berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan masing-masing K/L dan Pemda.	Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	Analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan pada setiap Sekretariat, Bidang dan UPT PJJ DPU Bina Marga Jatim
		Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi	Rencana kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi
2.	Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di lingkungan masing-masing K/L dan Pemda;	-	-	-
3.	Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan masing-masing K/L dan Pemda;	-	-	-
4.	Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center;	-	Pengajuan usulan Assessment pegawai/uji kompetensi eselon III,IV dan pelaksana DPU Bina Marga pada Badan Diklat Prov. Jatim	Usulan Assessment pegawai/uji kompetensi eselon III,IV dan pelaksana DPU Bina Marga pada Badan Diklat Prov. Jatim
5.	Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai di masing-masing K/L dan Pemda;	-	Penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi	Penetapan kinerja individu kepada seluruh pegawai DPU Bina Marga

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019	REALISASI RENCANA AKSI RB TA 2019
				Penilaian kinerja individu
				Evaluasi atas kinerja individu
6.	Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja di masing-masing K/L dan Pemda;	Perumusan dan penerapan system rewards and punishment dalam pengukuran kinerja	Penerapan system rewards and punishment dalam pengukuran kinerja	Aturan disiplin telah diimplementasikan kepada seluruh pegawai DPU Bina Marga
				Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala melalui sistem absen yang terintegrasi dengan sistem perhitungan tunjangan prestasi pegawai
				Pemberian sanksi kepada pegawai yang melanggar disiplin berupa pemotongan tunjangan prestasi pegawai
7.	Pembangunan/ pengembangan sistem informasi ASN di masing-masing K/L dan Pemda;	-	Pembangunan/ pengembangan sistem informasi ASN DPU Bina Marga	Data Sistem informasi ASN DPU Bina Marga yang up to date
8.	Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di masing-masing K/L dan Pemda;	-	-	-

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019	REALISASI RENCANA AKSI RB TA 2019
9.	Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di masing-masing K/L dan Pemda;	-	-	-
10.	Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di masing-masing K/L dan Pemda.	-	-	-
11.	Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);	-	-	-
12.	Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN	-	-	-
13.	Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan	-	-	-

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019	REALISASI RENCANA AKSI RB TA 2019
14.	Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja	-	-	-

7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Untuk mewujudkan harmonisasi peraturan perundang - undangan dan pengendalian dalam penyusunan peraturan internal, sesuai dengan Tugas dan Fungsi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, upaya-upaya yang telah dilakukan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.6 Realisasi Rencana Aksi Penguatan Peraturan Perundang-undangan

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019	REALISASI RENCANA AKSI RB TA 2019
1.	Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;	Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan (PERDA, Pergub, SK) yang sedang diberlakukan	Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan (PERDA, Pergub, SK) yang sedang diberlakukan	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Jalan dengan Pemda Kabupaten/Kota untuk identifikasi fungsi jalan kabupaten/kota sebagai bahan persiapan Penyusunan SK Gubernur Jatim tentang Penetapan Fungsi dan Status Jalan Provinsi

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019	REALISASI RENCANA AKSI RB TA 2019
				Usulan perubahan atas peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DPU Bina Marga Prov. Jawa Timur
2.	Menyempurnakan /mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;	Menyempurnakan /mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain	Menyempurnakan /mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain	Spesifikasi Umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019
				HSPK Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019
				Buku Panduan Tata Kelola Administrasi Alih Fungsi dan Status Jalan Kabupaten menjadi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Jawa Timur
3.	Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan;	-	-	-

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada publik secara lebih lancar, lebih cepat, lebih aman, dan lebih nyaman serta peningkatan indeks kepuasan masyarakat (*stakeholders* terkait) atas pelayanan yang diberikan, upaya-upaya yang telah dilakukan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

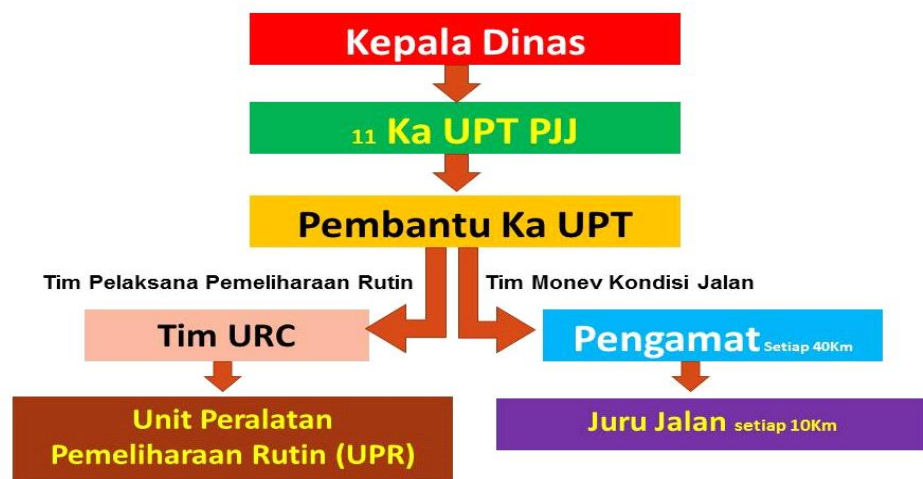
NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019	REALISASI RENCANA AKSI RB TA 2019
1.	Penerapan pelayanan satu atap di masing-masing kementerian/ lembaga dan pemda;		Pelayanan perijinan penggunaan rumija yang terintegrasi dengan P2T Prov. Jatim TA 2019	Pelayanan perijinan pemanfaatan tanah pada rumija yang terintegrasi dengan P2T Prov. Jatim
2.	Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari di masing-masing kementerian/ lembaga dan pemda;	-	-	Penerapan percepatan pelayanan perijinan berupa Rekomtek pemanfaatan tanah pada rumija selama maksimal 12 hari
3.	Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan di masing-masing kementerian/ lembaga dan pemda;	-	-	Penyusunan SOP Penerbitan Rekomtek pemanfaatan tanah pada rumija untuk utilitas/ non utilitas

NO.	ROAD MAP RB NASIONAL (PERMENPAN NO. 11 TAHUN 2015)	PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN RB OPD PEMPROV. JATIM TAHUN 2019 (SURAT GUB. JATIM 18/10/2019 NO. 069.5/21802/031.2/2019)	RENCANA AKSI DPU BINA MARGA TA 2019	REALISASI RENCANA AKSI RB TA 2019
4.	Pembangunan/ pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di masing-masing kementerian/ lembaga dan pemda;	Pembangunan/ pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Pembangunan/ pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Pembentukan Unit Pengelola Pengaduan (UPP) DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
				Pembentukan PPID DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
				Pemanfaatan aplikasi perijinan online (SIM Jalan) yang melekat pada web site binamarga.jatimprov.go.id dan terintegrasi dengan aplikasi P2T Prov. Jatim
				Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tiap tahun untuk mengetahui kepuasan masyarakat pengguna jalan terhadap pelayanan yg diberikan DPU Bina Marga Prov. Jatim melalui kegiatan Kajian Pengembangan Jalan
				Penyediaan mobil laboratorium keliling untuk pengujian teknis
				Pembuatan Aplikasi QRMS (Quick Respond Management System) pada TA 2019

9. Quick Wins

Berdasarkan Motto Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur yaitu "Tercapainya Penanganan Kerusakan Jalan Provinsi dalam waktu 1 x 24 jam", maka ditetapkan program percepatan (*Quick Wins*), yaitu Penanganan Kerusakan Jalan Provinsi berupa pemeliharaan rutin meliputi : penambalan lubang, pengaspalan ulang, perbaikan keretakan jalan, dan perbaikan pada kerusakan perkerasan lainnya, serta perataan bahu jalan, penimbunan bahu jalan pada kondisi bahu jalan yang elevasinya rendah dan pembersihan rumput pada bahu jalan dan pada saluran oleh Tim Pemeliharaan Rutin di 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan (UPT PJJ) yang tersebar di Jawa Timur. Untuk mendukung program *Quick Wins* tersebut dilaksanakan prosedur Pemeliharaan rutin yang digambarkan dengan struktur organisasi, sebagai berikut :

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemeliharaan Rutin



Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

A.2 Komponen Hasil

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan komponen pengungkit sebagaimana diuraikan di depan dimaksudkan untuk mewujudkan Sasaran RB

sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan sasaran RB dapat dilihat dari pengukuran atas aspek yang ditetapkan dalam Sasaran RB, sebagaimana uraian berikut:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dengan mengusulkan WBK dan WBBM pada unit kerja UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi.
2. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat, dengan menggunakan ukuran nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) dengan melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, dengan menggunakan ukuran nilai akuntabilitas kinerja.

Pengukurannya dengan menggunakan ukuran nilai akuntabilitas kinerja, dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 oleh Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur, memperoleh predikat A dengan interpretasi Memuaskan. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur menunjukan hasil yang baik.

B. Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan dan upaya pemecahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RB pada DPU Bina Marga dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9 Permasalahan dalam Pelaksanaan RB DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Upaya Pemecahannya

No.	Permasalahan	Upaya Pemecahan
1.	Kurang optimalnya perubahan pola pikir (<i>mindset</i>) dan budaya kerja pejabat/pegawai dalam pelaksanaan RB karena kurangnya pemahaman dan perbedaan cara pandang terhadap upaya perubahan.	Melakukan komunikasi dan sosialisasi yang lebih intensif dengan melibatkan seluruh pejabat/pegawai di berbagai tingkatan secara aktif dalam diskusi pelaksanaan RB, seperti forum <i>FGD</i> mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam seminar/diklat/ <i>workshop</i> terkait RB; dan mendorong seluruh jajaran pimpinan untuk menjadi <i>role model</i> atau agen perubahan.
2.	Belum optimalnya dukungan dan koordinasi unit kerja terkait karena adanya ego sektoral dan persepsi keberhasilan pelaksanaan RB (dalam bentuk penciptaan dokumen RB) merupakan tanggung jawab unit kerja yang mempunyai kewenangan untuk menjadi koordinator pelaksana RB, sehingga berimplikasi pada kurang efektifnya pelaksanaan RB.	Perlu membentuk tim atau kelompok kerja yang anggotanya merupakan perwakilan dari unsur terkait di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur untuk menyusun pelaksanaan RB. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan perubahan dalam pelaksanaan RB sesuai bidang atau area perubahan.
3.	Kurang efektifnya media	Meningkatkan keberadaan media

No.	Permasalahan	Upaya Pemecahan
	komunikasi karena terbatasnya media, muatan informasi, dan intensitas penyampaian informasi.	komunikasi dan pemanfaatannya, serta mendorong pejabat/pegawai di berbagai tingkatan untuk berpartisipasi aktif dalam mengkomunikasikan pelaksanaan RB secara intensif.
4.	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja.	mengembangkan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
5.	Penunjukan UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi sebagai Zona Integritas atau area Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Tahun 2019 belum ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.	UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi perlu koordinasi dan sinkronisasi yang intensif dengan Biro Organisasi sebagai pembina Pelaksanaan RB terkait langkah-langkah yang perlu diambil untuk percepatan tindak lanjut enunjukan UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi sebagai Zona Integritas atau area Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
6.	Kurangnya sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan RB dan evaluasinya dari instansi pembina (Biro Organisasi, Kementerian PAN dan RB) khususnya terkait ketersediaan petunjuk teknis kegiatan RB sesuai Road Map RB Nasional sehingga berimplikasi pada kurang optimalnya pelaksanaan RB dan timbulnya	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan lebih proaktif dalam mengantisipasi perubahan kebijakan.

No.	Permasalahan	Upaya Pemecahan
	persepsi pelaksanaan RB hanya untuk menyusun dokumen saja.	

C. Saran dan Tindak Lanjut Evaluasi Implementasi SAKIP dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Evaluasi pada bulan Juli 2019, dalam rangka lebih mengefektifkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, rekomendasi dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada table 3.10 berikut:

Tabel 3.10 Saran dan Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan RB DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

No.	Rekomendasi Tim Evaluasi	Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan DPU Bina Marga Prov. jatim
1.	Membentuk Tim Reformasi Birokrasi terdiri dari 8 (delapan) area perubahan	Tim Reformasi Birokrasi DPU Bina Marga telah dibentuk berdasarkan SK Kepala DPU Bina Marga tanggal 01 Nopember 2019 No. 821.1/20539/KPTS/ 103/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi dpu Bina Marga Prov. Jatim
2.	Menyusun Rencana Kerja;	Rencana Kerja Pelaksanaan RB DPU Bina Marga telah disusun Road Map Nasional sesuai Permen PAN RB Nomor 11 Tahun

No.	Rekomendasi Tim Evaluasi	Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan DPU Bina Marga Prov. jatim
		2015 dan Petunjuk Teknis Gubernur Jawa Timur
3.	Mensosialisasikan Reformasi Birokrasi kepada seluruh ASN;	Sosialisasi RB pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran DPU Bina Marga TA 2019 Oktober 2019.
4.	Menunjuk unit kerja untuk dicanangkan Zona Integritas (ZI) dan dilakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);	Menunjuk unit kerja Laboratorium Pengujian Konstruksi sebagai Zona Integritas
5.	Menyusun rencana kerja terkait pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);	-
6.	Menyusun rencana kerja terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai dengan PP 60 tahun 2008;	-
7.	Mensosialisasikan prosedur penanganan pengaduan masyarakat;	SOP Pengaduan Masyarakat
8.	Mensosialisasikan Whistle Blowing System (WBS) kepada seluruh ASN;	Sosialisasi WBS pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran DPU Bina Marga TA 2019 Oktober 2019.
9.	Menyusun Rencana Kerja terkait Benturan Kepentingan.	-

No.	Rekomendasi Tim Evaluasi	Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan DPU Bina Marga Prov. jatim
10.	Menyusun Rencana Kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	Dalam proses

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur tahun 2019 dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara jalan berbasis kinerja secara bertahap dan berkesinambungan, dalam pelaksanaannya berdasar Rencana Aksi pada 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari 9 (sembilan) program yakni manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM Aparatur, penguatan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan *Quick Wins*.
2. Rencana Aksi RB disusun berpedoman pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas Nasional pada Road Map Nasional sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 dan Petunjuk Teknis Gubernur Jawa Timur tentang Percepatan Pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi.
3. Realisasi Kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Aksi RB tahun 2019 sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik. Terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi pada tahun 2019 terutama pada program Penguatan Pengawasan dan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan OPD lain dan membutuhkan petunjuk teknis dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya.

B. Rekomendasi

1. Kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi pada Rencana Aksi tahun 2019 agar dijadwalkan pada tahun 2020, dengan terlebih dulu membuat perencanaan ulang disertai dengan time line pelaksanaannya.
2. Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur perlu menyediakan petunjuk teknis pelaksanaan terkait kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas nasional pada program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional sehingga terdapat kesepahaman Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan RB tersebut.
3. Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur perlu memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan RB guna mewujudkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang berbasis kinerja.

